



RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM 2023



PEMERINTAH KOTA BATAM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2022



RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM 2023



PEMERINTAH KOTA BATAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2022



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA BATAM TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

10. Peraturan. . .

10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 1);
12. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 942);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM TAHUN 2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II. . .

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP
- (3) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2023; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

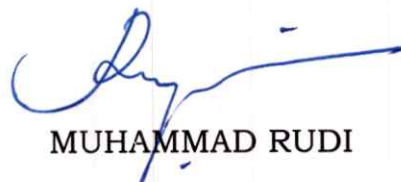
Agar . . .

-5-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 09 Juli 2022

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 09 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 985

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2023 ini.

Renja adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, yang disusun berpedoman kepada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.


Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2023.

Semoga Renja ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Batam, 29 Juli 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA BATAM



REZA KHADAFY, S.STP, MPA
Pembina Tk. I (IV/b)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Daftar Gambar.....	iii	
Daftar Tabel.....	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	4
	1.3 Maksud dan Tujuan	7
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	HASIL EVALUASI EVALUASI RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM TAHUN 2021.....	8
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	27
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	34
	2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	46
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	47
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	47
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	49
	3.3 Program dan Kegiatan	51
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	65
BAB V	PENUTUP.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah	3
Gambar 1.2	Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	4

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	11
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
Tabel T-C.30.1	Capaian Kinerja Pelanggaran K3 dan Pelanggaran Perda Tahun 2021	27
Tabel T-C.30.2	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	28
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	35
Tabel T-C.32	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Batam	46
Tabel T-C.32.1	Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	50
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024	54
Tabel T-C.33.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2022	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Agar pembangunan daerah lebih terarah dan terukur maka diperlukan perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah dengan prinsip-prinsip meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

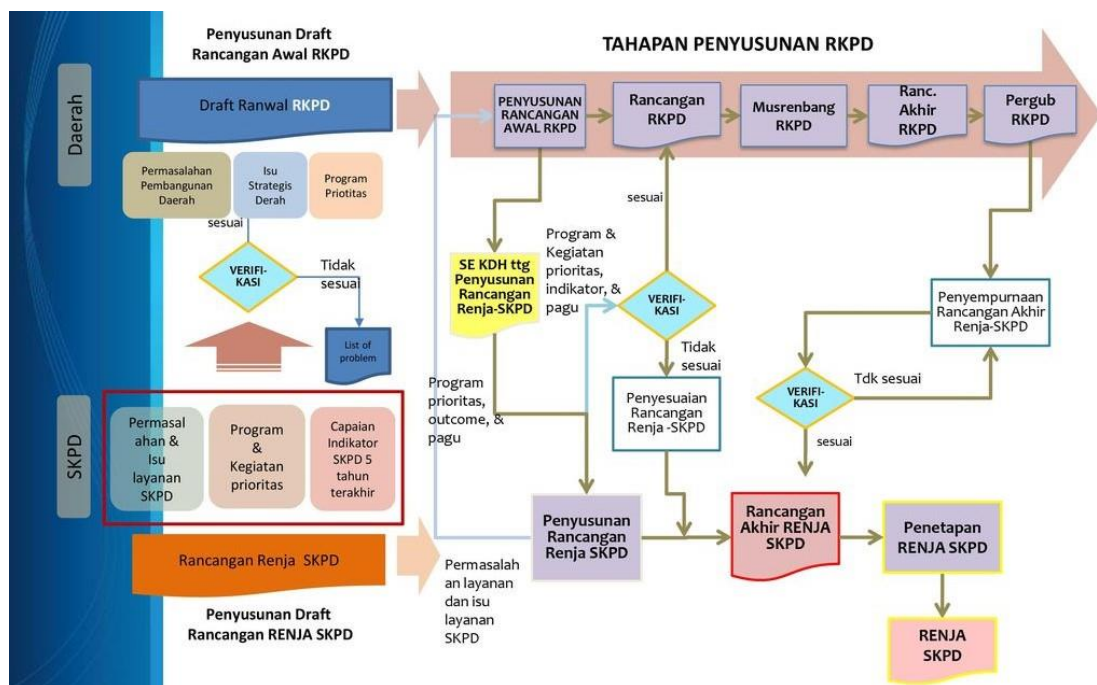
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari persiapan penyusunan Renja, penyusunan Rancangan Renja, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang penyusunan RKPD, penyusunan Rancangan Akhir Renja, dan penetapan Renja. Penyusunan Renja harus berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Tahapan penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar berikut ini:

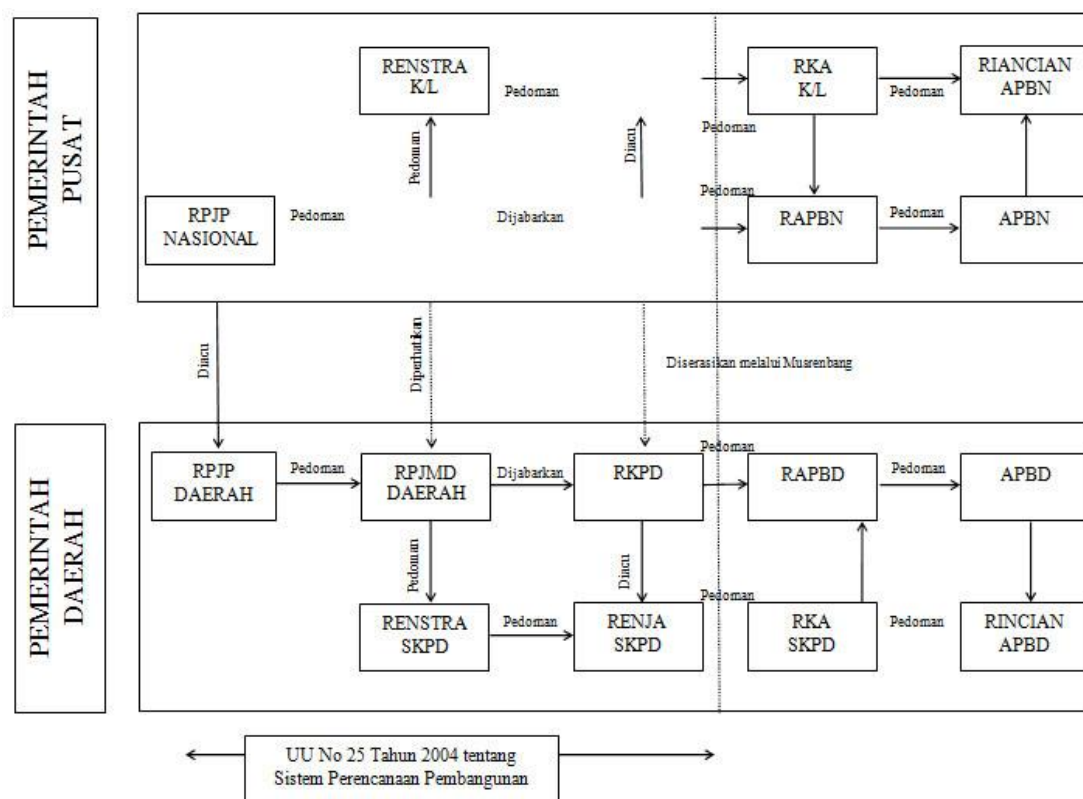


Gambar 1.2

Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.2

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - i. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - j. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
- r. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
- s. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;

- t. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batan Nomor 108);
- u. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026
- v. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 488);
- w. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kota Batam tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 942).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah untuk memberikan gambaran program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, yang disusun berpedoman kepada Renstra dan RKPD.

Tujuan dari penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2022 adalah untuk menyingkronkan dan menyinergikan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD)

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2023 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, yaitu pengertian Renja Perangkat Daerah. proses penyusunan Renja, keterkaitan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya; landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana kerja dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Perubahan Renja tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam merencanakan 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan, yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - 2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - a) Pengadaan Mebel;
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah:

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota:
 - a) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
 - b) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota:
 - a) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - b) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - c) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Batam:
 - a) Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS

Program dan kegiatan tersebut diakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang sama sebagaimana tertuang dalam Perubahan Renja.

Berikut ini disajikan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan pencapaian Renstra:

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022

Kota Batam

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Umum									
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	-	-	-	-	100%	100%	100
1.05.01. 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	-	-	-	-	100%	100%	100
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	-	-	-	-	-	212 Orang/Bulan	212 Orang/Bulan	-
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	-	-	-	-	-	9 Dokumen	100%	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	-	-	-	-	100%	100%	100
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	-	-	-	-	-	653 Paket	653 Paket	-
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	-	-	-	-	100%	100%	100
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponenvinstalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	9 Paket	9 Paket	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	7 Paket	7 Paket	-
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	3 Paket	3 Paket	-
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	-	-	-	-	9 Paket	9Paket	-
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	-	-	-	-	2 Dokumen	2Dokumen	-
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	-	-	-	-	15 Laporan	15 Laporan	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	-	-	-	-	100%	100%	100
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	-	-	-	-	-	6 Unit	6 Unit	-
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	-	-	-	-	100%	100%	100
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	-	-	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	-
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	-	-	-	-	100%	100%	100
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	-	-	-	-	-	2 Unit	2 Unit	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipeliharadan dibayarkan pajak dan perizinannya	-	-	-	-	-	20 Unit	20 Unit	-
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	-	-	-	-	45 Unit	45 Unit	-
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100
		2. Persentase penegakan Perda dan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Perkada								
		3. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	100%	-	-	-		100%	100%	100
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1. Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani	100%	-	-	-	-	100%	100%	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		2. Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan								
		3. Persentase Polisi Pamong Praja yang memenuhi standar kualifikasi								
		4. Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		5. Persentase jenis sarpras trantibum yang terpenuhi sesuai kebutuhan								
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	-	-	-	-	-	100 Kasus	100 Kasus	-
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui	-	-	-	-	-	15 Kasus	15 Kasus	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa yang dilakukan penindakan								
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkat kapasitasnya	-	-	-	-	-	58 Orang	58 Orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Manusia									
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100%	-	-	-	-	100%	100%	100
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.02.2.02.01	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan perda dan perkada	-	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran perda dan peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	-	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100
1.05.02.2.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS Satpol PP	8,25%	-	-	-	-	4,37%	4,37%	52,97

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan perda dan perkada	-	-	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	-

Dari pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2022 yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2022 dan Renstra dengan rincian sebagai berikut:

a. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja Renja Tahun 2022:

- 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan realisasi 100%, sehingga tingkat capaian kinerja Renja dan Renstra juga 100%;
- 2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan realisasi 100%, sehingga tingkat capaian kinerja Renja dan Renstra juga 100%;
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi 100%, sehingga tingkat capaian kinerja Renja dan Renstra juga 100%;
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi 100%, sehingga tingkat capaian kinerja Renja dan Renstra juga 100%;
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi 100%, sehingga tingkat capaian kinerja Renja dan Renstra juga 100%;
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi 100%, sehingga tingkat capaian kinerja Renja dan Renstra juga 100%;

b. Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja Renja Tahun 2022:

- 1) Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertinban dan penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, di mana selama tahun 2022, aksi unjuk rasa yang ditangani sebanyak 32kasus, sedangkan target Renja sebanyak 15 kasus.

Banyaknya aksi unjuk rasa yang ditangani disebabkan banyaknya penolakan terhadap UU Cipta Lapangan Kerja (*Omnibus Law*).

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022 telah memenuhi target kinerjaRenja 2022 dan Renstra 2021-2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan urusan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dalam Renstra Tahun 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja merencanakan 2 (dua) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Berikut ini adalah pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tahun 2022:

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2021)	Tahun n-1 (2022)	Tahun n (2023)	Tahun n+1 (2024)	Tahun n-2 (2021)	Tahun n-1 (2022)	Tahun n (2023)	Tahun n+1 (2024)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Kegiatan Urusan Penunjang yang Terpenuhi			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3			-	100%	100%	100%	-	99,70 %	100%	100%	
3	Persentase Penegakan Perda			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), dalam aspek dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan tingkat *outcome* Pemerintah Daerah, indikator kinerja bidang/urusan ketentraman dan ketertiban umum adalah:

- a. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan, dengan rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100\%$$

- b. Persentase Penegakan Perda, dengan rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Pelanggaran penyelesaian penegakan Perda}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda}} \times 100\%$$

Capaian kinerja penyelesaian pelanggaran K3 dan pelanggaran Perda tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.30.1

Capaian Kinerja Pelanggaran K3 dan Pelanggaran Perda Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus yang Selesai	Realisasi
1	2	3	4	5	17
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100%	777	698	99.70%

2	Persentase Penegakan PERDA	100%			100%
---	----------------------------	------	--	--	------

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Pemerintah Kota Batam sedang giatnya melakukan pembangunan infrastruktur khususnya jalan seluruh wilayah Kota Batam dalam upaya untuk mendukung pengembangan pariwisata. Namun banyaknya lahan yang dikuasai oleh masyarakat tanpa dokumen yang legal serta tidak sesuai dengan rencana tata ruang telah menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban dan keindahan bagi Kota Batam.

Sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentu saja ditemukan masalah-masalah yang dapat menghambat pencapaian kinerja. Beberapa permasalahan umum yang dapat diidentifikasi oleh Satpol PP Kota Batam terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.30.2

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masih tingginya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum	1. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan daerah masih kurang 2. Kesulitan ekonomi dan kesejahteraan sosial terutama dampak pandemi Covid-19
2.	Masih tingginya pelanggaran terhadap peraturan daerah	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum Penegakan terhadap	1. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan daerah masih kurang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		pelanggaran peraturan daerah masih kurang	2. Kesulitan ekonomi dan kesejahteraan sosial terutama dampak pandemi Covid-19
3.	Gangguan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat cukup tinggi	Penerapan sistem keamanan lingkungan masih kurang	Jumlah Linmas masih sedikit dan kurang diberdayakan
4.	Belum maksimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	1. Kualitas SDM aparaturnya masih kurang 2. Sarana dan prasarana masih terbatas	Alokasi anggaran pengembangan SDM dan peningkatan sarana dan prasarana terbatas
5.	Belum terpenuhinya penempatan petugas linmas sesuai SPM 1 orang pada 1 RT	Cakupan petugas linmas standar SPM adalah 1 orang pada 1 RT, saat ini di Kota Batam belum seluruh RT memiliki petugas linmas	Kekurangan personel/anggota linmas dan alokasi anggaran terbatas

Sumber: Hasil analisis

Permasalahan umum Kota Batam adalah tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap peraturan perundangan, dan untuk urusan Trantibum, gangguan dan pelanggaran Trantibum dan Perda juga cukup tinggi. Pelanggaran-pelanggaran itu disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ada di Kota Batam. Tingginya gangguan dan pelanggaran Trantibum dan Perda berakar dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di Kota Batam. Selain itu kualitas SDM aparaturnya juga berperan terhadap penegakan gangguan dan Pelanggaran Trantibum dan Perda. Dalam hal perlindungan masyarakat belum terpenuhi secara maksimal dimana anggota perlindungan masyarakat (linmas) belum memenuhi standar SPM 1 petugas linmas untuk 1 rukun tetangga (RT). Menindaklanjuti hal tersebut, pada bulan September 2022 Satpol PP Kota Batam telah membuat terobosan dengan membentuk

Praja Pembina Perlindungan Masyarakat (Prabinmas) dengan program 1 anggota Satpol PP ditempatkan di 1 kelurahan yang bertugas sebagai pembina petugas/anggota linmas yang ada di wilayah kelurahan terkait dan bersinergi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir kekurangan petugas linmas ditingkat RT.

Sejak pertama kali dikembangkan menjadi kota industri, perdagangan, jasa dan alih kapal pada awal tahun 1970-an, Kota Batam telah mengalami banyak kemajuan. Pengembangan Kota Batam oleh Pemerintah Pusat tak terlepas dari letak Kota Batam yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga dan daerah-daerah yang menjadi lalu lintas perdagangan internasional, hal ini tentu berimplikasi positif pada posisi geostrategik Kota Batam. Dalam perspektif ekonomi, wilayah Kota Batam menjadi daya tarik bagi negara tetangga untuk berinvestasi dan merelokasi aktivitas ekonomi mereka ke Batam, mulai dari aktivitas industri, perdagangan maupun jasa.

Pengembangan dan kemajuan Kota Batam juga menjadi daya tarik bagi pendatang dari berbagai daerah sehingga menjadikan kota ini kota yang heterogen dengan multikultur dan menjadi miniatur Indonesia karena hampir semua etnis dan agama terdapat di kota ini yang berdampak kepada meningkatnya jumlah penduduk.

Kondisi ini selain berdampak positif yaitu menambah khasanah kekayaan budaya juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa gangguan terhadap keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum. Jumlah penduduk yang banyak dan heterogen sangat rawan menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Selain itu, pandemi Covid-19 yang menyerang dunia tak terkecuali Indonesia dan Kota Batam sejak tahun awal tahun 2020 telah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi berbagai sektor terutama ekonomi dan kesehatan. Salah satu upaya pencegahan pandemi tersebut adalah dengan menerapkan cara hidup baru yang biasa disebut *New Normal* dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Penerapan protokol kesehatan di Kota Batam diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Dan sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas untuk menegakkan Perda/Perkada, Satuan Polisi Pamong Praja berada di garis terdepan dalam penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2021 diatas.

Pengawasan atas kepatuhan masyarakat dan penegakan disiplin terhadap penerapan protokol kesehatan Covid-19 harus terus dilakukan guna menekan penyebaran Covid-19 di Kota Batam.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu-isu strategis harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Beberapa isu strategis Kota Batam yang tertuang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Adaptasi terhadap Normal Baru pasca wabah Covid-19
- b. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. Reformasi Birokrasi;
- d. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;

- g. Mewujudkan Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional;
- h. Menciptakan Batam sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional;
- i. Pembangunan gender dan pemberdayaan kelompok difabel dan kelompok rentan;
- j. Peluang Pembiayaan Pembangunan Non APBD.

Dari 10 (sepuluh) isu strategis Kota Batam di atas, akan dipilih isu-isu strategis Kota Batam yang relevan dan penting bagi Satpol PP. Isu-isu strategis Kota Batam yang relevan dan penting bagi Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah:

- a. Mengembangkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing

Salah satu mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum adalah standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat. Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Linmas perlu dilakukan untuk mengembangkan kompetensi dan keahlian agar cakap dalam menghadapi, menangani dan menyelesaikan pelanggaran Perda dan Perkada serta gangguan Trantibum. Dalam hal perlindungan masyarakat (linmas) telah dibentuk Praja Pembina Perlindungan Masyarakat (Prabinmas) dengan program 1 orang anggota Satpol PP ditempatkan untuk 1 kelurahan yang ada di Kota Batam.

- b. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Pemerintah Kota Batam sedang giatnya melakukan pembangunan infrastruktur khususnya jalan seluruh wilayah Kota Batam dalam upaya untuk mendukung pengembangan pariwisata. Namun banyaknya lahan yang dikuasai oleh masyarakat tanpa dokumen yang legal serta tidak sesuai dengan rencana tata ruang telah menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban dan keindahan Kota Batam.

Oleh karena itu penataan bahu jalan guna mendukung peningkatan infrastruktur pada jalan-jalan utama dan penertiban Kawasan-

kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukan terus dilakukan oleh Satpol PP bersama tim terpadu.

c. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi ditunjukkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik harus selalu diupayakan dan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Batam. Isu reformasi birokrasi selalu relevan dalam upaya meningkatkan profesionalitas pemerintah daerah, pola pelaksanaan reformasi birokrasi bersifat iteratif yang terus menyesuaikan dengan dinamika tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang lebih baik.

Sebagai pemangku urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satpol PP harus dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku dan kode etik yang telah ditetapkan.

d. Adaptasi terhadap Normal Baru pasca wabah Covid-19

Merebaknya pandemi Covid-19 beserta penanganannya menimbulkan protokol kesehatan baru yang perlu dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat serta menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baru yang sering disebut dengan normal baru. Era dimana kebiasaan-kebiasaan baru tersebut menjadi normal disebut dengan era normal baru. Pada era tersebut, kebiasaan baru tidak hanya timbul pada aktivitas masyarakat sehari-hari termasuk dalam sektor bisnis dan pemerintahan. Normal baru akan mendorong berubahnya cara berkomunikasi, interaksi, dan menjalankan bisnis bagi sebagian besar masyarakat.

Dalam rangka pencegahan Covid-19 dan adaptasi terhadap kehidupan normal baru, Pemerintah Kota Batam mengeluarkan Peraturan Walikota Batam (Perwako) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Batam. Satpol PP sebagai Perangkat Daerah Kota Batam yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dan menjadi garda terdepan dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 sebagaimana diatur dalam Perwako tersebut.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada Ranwal RKPD, salah satu prioritas pembangunan tahun 2022 adalah Peningkatan dan Fasilitasi Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah, dengan focus menciptakan kenyamanan dan kepastian investasi melalui fasilitasi sarana pendukung investasi di bidang lahan, infrastruktur dasar dan utilitas serta dukungan aspek legal. Salah satu program untuk mewujudkan prioritas dan focus pembangunan tersebut adalah Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang merupakan urusan yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel T-C. 31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Batam

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam		100%	49,038,807,290	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	49,038,807,290	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	546,530,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	28,516,361,000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam		199 Orang	28,450,601,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	199 Orang/Bulan	28,450,601,000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam		1 Tahun	65,760,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	276 Dokumen	65,760,000	
Administrasi Kepegawaian	Kota Batam	Tersedianya administrasi kepegawaian	100%	546,530,000	Administrasi Kepegawaian	Kota Batam	Persentase administrasi kepegawaian	100%	546,530,000	

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Perangkat Daerah		perangkat daerah			Perangkat Daerah		perangkat daerah yang terlaksana			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam		1 Tahun	546,530,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 Paket	546,530,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100%	405,980,750	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	405,980,750	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam		1 Tahun	5,578,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah paket Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	5,578,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam		1 Tahun	70,613,750	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Paket	70,613,750	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam		1 Tahun	94,241,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 Paket	94,241,000	
Penyediaan Barang Cetak dan	Kota		1 Tahun	30,808,000	Penyediaan Barang Cetak dan	Kota	Jumlah paket barang cetak dan	2 Paket	30,808,000	

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Penggandaan	Batam				Penggandaan	Batam	penggandaan yang disediakan			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kota Batam		1 Tahun	5,400,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kota Batam	Jumlah dokumen bahan bacaandan peraturan perundang- undangan yang disediakan	1 Dokumen	5,400,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Kota Batam		1 Tahun	199,340,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	4 Laporan	199,340,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	536,092,500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	536,092,500	
Pengadaan Mebel	Kota Batam		1 Tahun	244,808,000	Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah paket mebel yang disediakan	4 Unit	244,808,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam		1 Tahun	291,284,500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	40 Unit	291,284,500	

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	18,630,435,040	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	18,630,435,040	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Kota Batam		1 Tahun	214,200,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Kota Batam	Jumlah laporan penyediaan jasa, komunikasi, sumber daya airdan listrik yang disediakan	48 Laporan	214,200,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam		1 Tahun	18,416,235,040	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum Umum Kantor yang disediakan	72 Laporan	18,416,235,040	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	403,408,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100%	403,408,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kota Batam		1 Tahun	80,760,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kota Batam	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan	4 Unit	80,760,000	

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam		1 Tahun	139,270,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah kendaraan dinasoperasional ataulapangan yang dipelihara, dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20 Unit	139,270,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam		1 Tahun	25,770,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 Unit	25,770,000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam		1 Tahun	157,608,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	157,608,000	
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Batam		100%	2,817,363,000	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Batam	1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	2,817,363,000	
							2. Persentase penegakan	100%		

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Perda dan Perkada			
							3. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	100%		
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	2,316,369.000	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1. Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani	100%	2,316,369.000	
							2. Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan			
							3. Persentase Polisi Pamong Praja yang memenuhi standar kualifikasi			
							4. Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena			

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada			
							5. Persentase jenis sarpras trantibum yang terpenuhi sesuai kebutuhan			
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Batam		1 Tahun	221,661,000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Batam	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan Linmas dalam rangka Trantibum	6 Dokumen	221,661,000	
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Batam		12 Kali	1,076,423,000	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Batam	Jumlah kasus gangguan trantibum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	100 Kasus	1,076,423,000	
Penindakan atas Gangguan	Kota		37 Kali	411,970,000	Penindakan atas Gangguan	Kota	Jumlah kasus gangguan trantibum	37 Kasus	411,970,000	

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perdadakan Perkada melalui Penertibandan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Batam				Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perdadakan Perkada melalui Penertibandan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Batam	berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan			
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugasyang Bernuasa HakAsasi Manusia	Kota Batam		35 Orang	201,955,000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugasyang Bernuasa HakAsasi Manusia	Kota Batam	Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	35 Orang	201,955,000	
Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Batam		100%	379,320,000	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tersedia	9 Unit	379,320,000	
Penyediaan Layanan dalam	Kota		100%	25,000,000	Penyediaan Layanan dalam	Kota	Jumlah laporan penyediaan layanan	10 Laporan	25,000,000	

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Batam				rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Batam	dampak penegakan perda dan perkada yang terlayani			
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Batam	Persentase Penegakan Perda	100%	436,190,000	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Batam	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	100%	436,190,000	
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Batam		12 Kali	36,480,000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Batam	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha/	12 Laporan	36,480,000	
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan	Kota Batam		30 Kali	257,990,000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan	Kota Batam	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan perkada	34 Laporan	257,990,000	

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Bupati/Walikota					Bupati/Walikota					
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Batam				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Batam	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran perda dan peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	6 Laporan	141,720,000	
Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Batam	Rasio PPNS Satpol PP		64,804,000	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Batam	Rasio PPNS Satpol PP	5.34%	64,804,000	
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Batam				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	64,804,000	

2.5 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan usulan program dan kegiatan kepadapemerintah melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun secara langsung kepada Perangkat Daerah terkait.

Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam akan memperhatikan usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat baik melalui Musrenbang maupun yang disampaikan langsung kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

TABEL T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023
KOTA BATAM

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, visi pembangunan nasional adalah "**Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur**". Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah menetapkan 8 (delapan) misi, yaitu:

- 1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
- 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- 3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
- 4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
- 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
- 6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
- 7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya.

Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMN secara ringkas adalah sebagai berikut:

- 1) RPJMN ke-1 (2005–2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk

menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.

- 2) RPJMN ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.
- 3) RPJMN ke-3 (2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.
- 4) RPJMN ke-4 (2020–2024) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Saat ini kita telah memasuki RPJMN ke-4 (2020-2024) yang merupakan periode ke-2 kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang kini berpasangan dengan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin setelah kembali terpilih pada Pemilu tanggal 17 April 2019 dan telah dilantik pada 20 Oktober 2019.

Visi Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Misi yang ditetapkan adalah:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Pemerintah menetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

7 (tujuh) agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 di atas tetap dipertahankan sebagai prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.

3.2. Tujuan, dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah adalah **“Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum”**.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah:

- a. Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemeritahan Daerah;
- b. Menurunnya pelanggaran Trantibum;
- c. Menurunnya pelanggaran Perda.

Rincian tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel T-C.32.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum		Persentase penurunan pelanggaran Trantibum dan Perda	11,10%	12,50%	14,30%	16,70%	20%	25%
		1.Otimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraa n Urusan Pemeritahan Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariat	80	82	84	86	88	90
		2.Menurunnya Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	1. Persentase penurunan Trantibum	11,10%	12,50%	14,30%	16,70%	20%	25%
		3.Menurunnya Pelanggaran Perda	2. Persentase penurunan pelanggaran Perda	11,10%	12,50%	14,30%	16,70%	20%	25%

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
 - 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Penanganan Gangguan Ketenteraman danKetertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota:
- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegat Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
 - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada;
- 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota:
- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;
 - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;
- 3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2023 adalah berikut:

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2023

dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				51,856,170,290				57,744,617,319
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	100%	49,038,807,290	APBD		100%	54,645,518,019

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					KOTA								
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Batam	100%	28,516,361,000	APBD		100%	31,367,997,100
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	199 Orang/Bulan	28,450,601,000	APBD		100%	31,295,661,100
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	324 Dokumen	65,760,000	APBD		100%	72,336,000
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	Kota Batam	100%	546,530,000	APBD		100%	601,183,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Batam	2 Paket	546,530,000	APBD		100%	601,183,000
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	100%	405,980,750	APBD		100%	446,578,825
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	5,578,000	APBD		100%	6,135,800
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	7 Paket	70,613,750	APBD		100%	77,675,125
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam	3 Paket	94,241,000	APBD		100%	103,665,100
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	2 Paket	30,808,000	APBD		100%	33,888,800

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Batam	1 Dokumen	5,400,000	APBD		100%	5,940,000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Dilaksanakan	Kota Batam	4 Laporan	199,340,000	APBD		100%	219,274,000
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Kota Batam	100%	536,092,500	APBD		100%	1,292,531,750
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Batam	4 Paket	244,808,000	APBD		100%	269,288,800
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	40 Unit	291,284,500	APBD		100%	320,412,950

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Kota Batam	100%	18,630,435,040	APBD		100%	20,493,478,544
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	48 Laporan	214,200,000	APBD		100%	235,620,000
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam	72 Laporan	18,416,235,040	APBD		100%	20,257,858,544
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	Kota Batam	100%	403,408,000	APBD		100%	443,748,800

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	4 Unit	80.760.000	APBD		100%	88.836.000
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam	20 Unit	139,270,000	APBD		100%	153,197,000
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	45 Unit	25.770.000	APBD		100%	28.347.000
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Batam	1 Unit	157,608,000	APBD		100%	173,368,800
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	Kota Batam	100%	2,817,363,000	APBD		100%	3,099,099,300

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2. Persentase Penegakan Perda dan Perkada		100%				100%	
						3. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada							
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum yang ditangani	Kota Batam	100%	2,316,369,000	APBD		100%	2,548,005,900
						2. Persentase Satlinmas yang Terlatih dan Dikukuhkan	Kota Batam	100%					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						3. Persentase Polisi Pamongpraja yang Memenuhi Standar Kualifikasi	Kota Batam	100%					
						4. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	Kota Batam	100%					
						5. Persentase Jenis Sarpras Trantibum yang Terpenuhi Sesuai Kebutuhan	Kota Batam	100%					
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	Kota Batam	100 Kasus	1,076,423,000	APBD		100%	1,184,065,300

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengawasan	Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan							
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kota Batam	37 Kasus	411,970,000	APBD		100%	453,167,000
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Batam	6 Dokumen	221,661,000	APBD		100%	243,827,100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Batam	35 Orang	201,995,000	APBD		100%	222,194,500
1	05	02	2.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kota Batam	9 Unit	379,320,000	APBD		100%	417,252,000
1	05	02	2.01	9	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kota Batam	1 Laporan	25,000,000	APBD		100%	27,500,000
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda yang Ditindaklanjuti	Kota Batam	100%	436,190,000	APBD		100%	479,809,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Perda/Perkada Kepada Masyarakat/Kelompok/Pelaku Usaha	Kota Batam	12 Laporan	36,480,000	APBD		100%	40,128,000
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Batam	34 Laporan	257,990,000	APBD		100%	283,789,000
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kota Batam	6 Laporan	141,720,000	APBD		100%	155,892,000
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS Satpol PP	Kota Batam	5.34%	64,804,000	APBD		6,31%	71,284,400

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Kota Batam	2 Laporan	64,804,000	APBD		100%	71,284,400
Total									51,856,170,290				57,744,617,319

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.33.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1														
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								57.744.617.319				
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								54.645.518.019				
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								31.367.997.100				
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	199 Orang/Bulan		28,450,601,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	31,295,661,100
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		JUmlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	324 Dokumen		65,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	72,336,000
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								601.183.000				
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	2 Paket		546,530,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	601,183,000
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								405.980.750				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	1 Paket		5,578,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	6,135,800	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	7 Paket		70,613,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	77,675,125	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	3 Paket		94,241,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	103,665,100	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	2 Paket		30,808,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	33,888,800	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	1 Dokumen		5,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	5,940,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	4 Laporan		199,340,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	219,274,000	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							536,092,500			1,292,531,750			
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	4 Paket		244,808,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	269,288,800	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	40 Unit		291,284,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	522.497.250	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							18,630,435,040			20,493,478,544			
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	48 Laporan		214,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	235,620,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	72 Laporan		18,416,235,040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	20,257,858,544	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							403,408,000				443,748,800		
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	4 Unit		80.760.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	88.836.000	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	20 Unit		139,270,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	153,197,000	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Pelihara		Kota Batam, Sagulung, Sagulung	100%	45 Unit		25.770.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	28.347.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
					Kota												
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ dRehabilitasi		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	1 Unit		157,608,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	173,368,800
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2,817,363,000				3,099,099,300			
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					2,316,369,000				2,548,005,900			
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Kasus		1,076,423,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	1,184,065,300

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37 Kasus		411,970,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	453,167,000	
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota		6 Dokumen		221,661,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	243,827,100	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota		35 Orang		201,995,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	222,194,500	
1	05	02	2.01	08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota		9 Unit		379,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	417,252,000	
1	05	02	2.01	10	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota		1 Laporan		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	27,500,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					436,190,000				479,809,000			
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		36,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	40,128,000
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34 Laporan		257,990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	283,789,000
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase aduan/temuan pelanggaran Perda/Perkada yang ditangani		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Laporan		141,720,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	155,892,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota					64,804,000					71,284,400			
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota		2 Laporan		64,804,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	71,284,400	
TOTAL										51,856,170,290				57,744,617,319				

BAB V

PENUTUP

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2023 ini merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra dan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang disingkat RKA Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Oleh karena itu pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Renja Tahun 2023 ini sangat bergantung pada ketersediaan anggaran Pemerintah Kota Batam yang tertuang dalam APBD, sehingga apabila di kemudian hari terjadi defisit anggaran, maka akan dilakukan penyesuaian target kinerja dengan kemampuan anggaran yang ada.

Renja Tahun 2023 ini hendaknya menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Demikian Renja Tahun 2023 ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023.